

Pertemuan Pengurus dengan KPK dan Pemkot Samarinda, Ini Keterangannya

SAMARINDA, Swara Kaltim

Setelah Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun dan jajarannya di Jalan Mulawarman, Rabu 30 Juni 2021, tentunya menjadi tanda tanya.

Kedatangan saat itu di sambut langsung Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Mursidi Muslim.

Saat di temui awak media di ruang kerja Kantor Sekretariat, Kamis (1/7/2021). Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahrudin yang akrab disapa Ayub menjelaskan, bahwa kedatangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berserta jajarannya yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan membawa sertakan Tim KPK

ini tanpa ada surat pemberitahuan.

"Kami juga tidak mengetahui kedatangan mereka, mestinya ada surat pemberitahuan, karena mereka ini adalah lembaga pemerintah yang biasanya ada SOP dan melalui administrasi (surat tersebut)," sebut Ayub.

"Sebenarnya agenda kami ini hanya menyambut aksi demo terkait dengan adanya tuntutan SK DPP tentang pergantian pimpinan DPRD Kaltim, dan tidak ada agenda pe-



Salah satu ruangan di RS A Wahab Sjahranie Samarinda yang merawat pasien positif Covid-19.

nyambutan kedatangan pihak Pemkot berserta jajarannya dan tim KPK," sambungnya.

"Kedatangan pihak Pemkot serta rombongan tersebut hingga selesai, aksi demo

belum mulai," jelasnya.

Dalam kedatangan anggota

► Baca: Pertemuan ... Hal. 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Mengucapkan

Selamat Hari Bhayangkara Ke-75

75
BHAYANGKARA
PRESISI
1 JULI 1946 - 1 JULI 2021

**TRANSFORMASI POLRI YANG PERSISI Mendukung PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
UNTUK MASYARAKAT SEHAT DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENUJU INDONESIA MAJU**

H. Edyanto Arkan, SE
Wakil Bupati Kutai Barat

FX. Yapan, SH
Bupati Kutai Barat

Ayonius, S. Pd., MM
Sekda. Kutai Barat

Ismail Gelar Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Gunung Tabur

SAMARINDA, Swara Kaltim

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ismail ST melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Desa Maluang, kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.

Ismail mengatakan fakta dilapangan menyebutkan banyak masyarakat yang belum paham terkait peraturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

Oleh sebab itu, lanjut Ismail perlu dilakukannya sosialisasi

oleh semua pihak baik lingkup pemerintahan maupun legislatif agar peraturan daerah tersebut bisa diketahui dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.

"Hasil pendekatan dan komunikasi kami pada masyarakat, ternyata Perda No 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Kaltim, untuk itu ini merupakan langkah kami bersama kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Kaltim untuk menyebarkan secara luas perda tersebut," kata Ismail di Sa-

marinda, Selasa.

Lebih lanjut Ismail mengatakan sekitar 100 orang hadir dalam acara pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat Covid-19 yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak serta penyediaan handsanitizer di lokasi acara.

Hadir dalam acara sosialisasi, Tokoh Masyarakat Maluang serta narasumber dari Untag Samarinda Hj. Fatimah Asyari SH. M.Hum dan Raja Ivan Sihombing, SH dari Advokat.

Politisi Partai Nasional

Demokrat (Nasdem) Kaltim itu menyampaikan jika masyarakat kecil yang tidak mampu sangatlah riskan saat menghadapi masalah hukum, padahal keadilan harus diberikan pada siapapun tanpa terkecuali.

"Pemerintah telah menyediakan layanan bantuan hukum, jika masyarakat terjerat persoalan hukum, masyarakat harus tau bahwa ada peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum kepada masyarakat," kata Ismail.

Ismail menambahkan penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim baik perorangan atau kelompok masyarakat dalam kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum.

"Orang atau kelompok orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kalimantan Timur yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan

dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat yang setingkat," jelas Ismail.

Ismail berharap masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai serta perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat dan Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum," tuturnya.

Ismail berharap melalui sosialisasi perda bantuan hukum ini dapat menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan.

"Perda yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di masyarakat itu juga dibuat demi mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum," jelas Ismail.

(ant)

Kelanjutan Pembahasan RUU PDP Tunggu Itikad Pemerintah

JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kelanjutan pembahasan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kembali pada itikad baik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai representasi pemerintah.

Hal itu, menurut Sukamta, karena perbedaan sikap antara Komisi I DPR dan pemerintah terkait dengan penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

"Belum adanya titik temu antara sikap Kominfo yang berkeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi di bawah kementerian dengan sikap Komisi 1 DPR yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah Presiden menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock," kata Sukamta di Jakarta, Kamis.

Sukamta menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan

sesuai dengan standar.

Selain itu, kata dia, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul karena saat ini data pribadi nilainya sangat mahal sehingga keberadaan lembaga itu semestinya ada di bawah Presiden untuk memastikan kewenangannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas.

"Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal," ujarnya.

Menurut dia, pertimbangan yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas itu setara dengan standar internasional, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).

Kalau sesuai dengan standar internasional, lanjut Sukamta, data WNI di Eropa akan diperlakukan dan diberikan perlindungan oleh GDPR. Sementara itu, jika tidak independen, itu dianggap tidak standar.

"Saat ini banyak negara melakukan revisi atas peraturan perlindungan data

pribadinya untuk diadaptasi dengan GDPR," katanya.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP itu menilai pembentukan lembaga atau badan pengawas itu sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yang diatur di dalam RUU PDP.

"Kewajiban itu terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yang sangat penting," kata Sukamta menegaskan.

Dalam hal ini, kata Sukamta, masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, mulai data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik, seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik, data keuangan, dan catatan kejahatan.

Sukamta menilai semua data tersebut berharga karena itu tanggung jawab pengelola data sangat besar sehingga lembaga pengawas juga harus memiliki otoritas yang kuat agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif. (ant)



Swara Kaltim

KORANNYA ORANG KALTIM

Penerbit : PT. Media Swara Kaltim
Direktur Utama : Erwin Yuniar
Komisaris : Siti Jariah

TARIF IKLAN : * Umum/Display (BW) : Rp 12.500,-/mmk. * Spot color : Rp 17.500,-/mmk. * Full color : Rp 22.500,-/mmk. * Halaman 1 BW : Rp 25.000,-/mmk. * Halaman 1 FC : Rp 45.000,-/mmk. * Iklan Deret (baris) : Rp 5.000,-/mmk. * Iklan Keluarga (Duka Cita) : Rp 10.000,-/mmk

PEMIMPIN REDAKSI : Mohammad Abdun Kuddu. **PENANGGUNG JAWAB** : Muhammad Syafranuddin. **REDAKTUR PELAKSANA** : M.Norjaya. **REPORTER** : Suherman, Sri Endang Purniawati, S. Iman Santoso, Doni Ari Wardana, Slamet Riyanto, Arbani, Andi Isnar, Nihayatun Hayati. **EDITING** : Alfian Nur. **FREELANCER** : Riki Perdana, Sofie Lestari. **MARKETING / IKLAN** : Andi Isnar (HP. 081249999220). **KORESPONDEN DAERAH** : Tenggara : Agus. Kutai Timur : - Jl. P. Diponegoro Gg. Taruna No.3 (HP. 0811557501). Kutai Barat : Alfian Nur (Jl Damai Raya, RT 05 Barong Tongkok, Sendawar. (HP: 081349444077). Balikpapan: Slamet Iman Santoso (Komplek Taman Sari Bukit Mutiara C-2 No.7 (HP. 081250577750). Penajam Paser Utara : Max Rempas (HP. 081350266123). Bontang: Burhanuddin (Jl. Flores No. 10 HP. 082158144444). Berau : B. Nihayatun Hayati, Jl. Durian III Perum Berau Indah Blok D 10 No. 4 Tanjung Redeb, Berau (HP. 0811599673). **BAGIAN KEUANGAN** : Rina Puspita. **DESIGN GRAFIS / LAYOUT** : Arbani, Muhammad Richie Eresty. **PERCETAKAN** : Swara Kaltim. **ALAMAT PERCETAKAN** : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. **ALAMAT REDAKSI / PEMASARAN** : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. **E-mail** : mediaswarakaltim@yahoo.com **Website / Online** : www.swarakaltim.com

Dalam menjalankan tugas jurnalistik Wartawan Swara Kaltim dibekali tanda pengenal, atau nama mereka tercantum dalam Box Redaksi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

kaltimprov.go.id

pemprov kaltim

pemprov_kaltim

H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMDR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si
GUBERNUR KALTIMIr. H. MUHAMMAD SABANI, M.Sc
Sekda Provinsi Kaltim**HUT Bhayangkara Ke-75,****Fokus Covid-19 dan PEN****BALIKPAPAN, Swara Kaltim**

Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri HUT Bhayangkara Ke-75 di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Kamis (1/6/2021).

Tahun ini HUT Bhayangkara mengangkat tema "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".

Secara nasional HUT Bhayangkara dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara Jakarta melalui telekonferensi.

Hadir sebagai tuan rumah Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK dan unsur Forkompimda Kaltim.

Gubernur Isran Noor sangat mengapresiasi tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini yang secara khusus fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Apalagi kasus positif Covid-19 di Kaltim terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Dirgahayu Polri. Terima kasih atas pengayoman dan pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Mari



kita bersama dalam penanganan pandemi Covid-19, sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat," ucap Isran Noor usai acara.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja dan jasa yang disumbangkan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Polri. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polri dalam penanganan Covid-19, selain melaksanakan tugas pengayoman kepada masyarakat," puji Presiden Joko Widodo.

Pesan lain disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta

dan wali kota Solo ini agar meski fokus bersama TNI dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Polri tidak boleh lengah dengan tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Dia mengingatkan bahwa bentuk ancaman terhadap negara dengan berbagai cara dan kepentingannya, dewasa ini semakin kompleks.

"Polri harus berpacu dengan iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan," tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar penggunaan kewenangan untuk melakukan penangka-

pan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya, harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

Alasan Presiden, karena Indonesia adalah negara Pancasila, negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Polri bukan hanya harus tampil tegas, tetapi juga harus menjadi pengayom dan pelindung serta melayani masyarakat luas," pesan Jokowi lagi.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog jarak jauh dengan Kapolres Timika di Papua, Kapolres Bangkalan di Jawa Timur, Kapolda Riau dan Kapolda Jawa Barat.

Beberapa hal ditanyakan Presiden Joko Widodo mulai soal keamanan di Papua, penanganan Covid-19 di Bangkalan/Madura, (Jawa Timur), penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan persiapan penerapan PPKM Mikro darurat di Jawa Barat.

Hadir pula para mantan Kapolda yang salah satunya diwakili Jenderal (Purn) Roesmanhadi.

"Selamat bertugas dan memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa dan negara. Dirgahayu Polri. Mohon doa restu, semoga pandemi ini bisa segera kita akhiri dan ekonomi Indonesia bisa pulih kembali," tutup Jokowi.

(sul / humasprovkaltim / adv / aya / sk)

Dekranasda jadi Pioner Kreatifitas**SANGATTA, Swara Kaltim**

Keragaman suku bangsa, adat istiadat, seni budaya, dan bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur akan kreatifitas. Dinamika kreatifitas terus berkembang kemudian melahirkan beragam seni kriya atau kerajinan.

Dengan kekayaan khasanah budaya itulah, ujar Ketua Dekranasda Kaltim, Hj Noorbaiti Isran, Dekranasda harus menjadi pionir penggerak industri kerajinan.

Kepada pengurus Dekranasda Kutim, istri Gubernur Kaltim ini menandakan Dekranasda terus menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan tradisi dan warisan budaya, termasuk membuat kerajinan yang semakin bermutu dan



berdaya saing.

Dalam acara yang dihadiri Bupati Ardiansyah, diakui, pesatnya teknologi informasi bisa dijadikan sarana untuk melakukan pemasaran sekaligus mempromosikan kerajinan dan di aplikasikan setiap Dekranasda yang ada di setiap

Kabupaten.

Dekranasda Kaltim, lanjut Noorbaiti, berupaya membantu menumbuh kembangkan industri kerajinan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal dengan cara membangun kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal. "Tan-

tangan saat ini dan kedepan berat sehingga diharapkan Dekranasda mampu menggali dan mengembangkan produk kerajinan agar lebih kreatif dan inovatif," ungkapnya.

Saat ini, Dekranasda Kaltim mempunyai tiga fokus kerja yaitu membina pengrajin te-

nun, membina pembuat anyaman dan mengembangkan UKM makanan.

"Fokus di tiga itu saja, hal ini apabila dikembangkan akan menjadi banyak produk unggulan di Kaltim," ungkapnya.

Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman berharap kepengurusan bisa membantu Dekranasda Kutim untuk lebih dikenal di masyarakat dan mampu masuk dan bersaing di pasar lokal, regional maupun internasional.

"Dekranasda Kutim mampu mengangkat produk-produk olahan dari masyarakat dan mampu bersaing ditingkat lokal, Regional bahkan melaju ke tingkat nasional," harap orang nomor satu di Pemkab Kutim ini. (sdn / humasprovkaltim / adv / aya / sk)



Hukum & Kriminal



Fasilitas Kesehatan Harus Perhatikan Keakuratan Surat Covid-19, 1 Kasus Palsukan Hasil Terjadi di RSUD AWS

SAMARINDA, Swara Kaltim

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur M Faisal mewanti-wanti kepada seluruh fasilitas kesehatan agar melakukan tindakan memastikan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium pada kasus Covid-19

"Malam ini (Rabu, 30 Juli, red) saya dapat laporan langsung dari Direktur RSUD AW Syahrani dr. David Hariadi Mansjhoer bahwa ada kejadian seorang pasien dengan kondisi sesak napas dan batuk serta sudah menunjukkan hasil Lab PCR negatif. Karena pasien cukup parah maka setelah dari UGD langsung dimasukkan ke ruangan untuk diberikan perawatan lebih lanjut, sesuai prosedur normal," kata Muhammad Faisal mengutip pernyataan dr David.

Kemudian lanjut Faisal setelah diopname, beberapa saat kemudian dicek melalui barcode Surat Hasil Lab tersebut. "Apa yang terjadi? Ternyata

ta Hasil Lab PCR nya adalah positif," ucap Faisal dengan nada meninggi kepada awak media.

Selanjutnya kata Faisal, tentu saja protokol penangan-

nan pasien tersebut berubah dan hal ini sangat membahayakan tenaga kesehatan yang melayani.

"Entah apa maksud pasien tersebut, tapi memanipulasi

data ini sangat membahayakan Nakes di RS dan orang-orang disekitarnya," ujar Faisal yang mengawali karier PNS-nya di Puskesmas Segiri Samarinda.

Dikatakan Faisal ini jadi pembelajaran semua fasilitas kesehatan di Kaltim, untuk melakukan cek dan ricek kembali hasil Laboratorium sebelum penanganan pasien yang membawa surat dari luar dengan hasil negatif bukan diperiksa RS sendiri.

"Ricek dari barcode yang ada sudah cukup akurat melihat hasil yang sebenarnya, pengalaman ini bisa saja nanti dibuat standart untuk hasil laboratorium wajib dilengkapi barcode, kalo ini tidak bisa diubah-ubah lagi oleh pasien atau siapa pun serta memudahkan melakukan ricek," ungkap Faisal.

Ditegaskannya ini membahayakan orang lain dan melakukan pemalsuan maka bisa saja ini dinaikan menjadi masalah hukum nantinya.

"Bukan saja bisa berurusan dengan hukum tapi ini saya yakin termasuk hukumnya haram," pungkas mantan Kabag Humas Pemkot Samarinda ini. (dho)

Jangan Gara-gara Satu Orang Narkoba, Satu Keluarga Berantakan

SAMARINDA, Swara Kaltim

Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba), tidak saja membahayakan dan merusak diri seseorang, tetapi dampaknya mampu mengganggu orang lain.

"Gara-gara anaknya Narkoba, satu keluarga dibuatnya susah," ungkap Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Selasa (29/6/2021).

Dihadapan juara Kontes Putra Putri Tari Indonesia 2021, yang berkunjung di ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini mengingatkan ancaman dan

bahaya barang haram yang bisa menghancurkan sebuah bangsa.

"Jadi, Narkoba ini bahayanya bisa merusak generasi bangsa bahkan menghancurkan peradaban suatu bangsa," tegasnya lagi.

Karena itu, lanjutnya, tidak salah kalau pemerintah menggandeng berbagai elemen dan komponen masyarakat, terlebih pemuda dan organisasi lainnya, untuk bersama-sama memerangi bahaya laten Narkoba.

Bagi suami Hj Erni Makmur ini, BNN dan pemerintah bersama aparat penegak

hukum seperti polisi, bahkan TNI terlibat memberangus para pengedar dan bandar Narkoba, tapi daerah bersama masyarakat ikut berperan penting didalamnya.

Apalagi, ujarnya, barang haram ini sudah masuk ke lingkungan masyarakat paling bawah (anak-anak dan ibu rumah tangga) hingga ke desa dan pedalaman.

"Maka, gerak dan upaya bersama harus terus dilakukan demi memerangi peredaran dan penyalahgunaannya di masyarakat," harap orang nomor dua *Benua Etam* ini.

Tidak terkecuali pemuda

dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pinta Hadi Mulyadi, lebih gencar melakukan upaya-upaya pencegahan demi mengantisipasi penyebaran dan peredaran Narkoba.

Selain mengedukasi anak-anak muda tentang bahaya Narkoba, ujar pria gemar bermain drum ini, selayaknya para pemuda mampu menggerakkan generasi muda untuk melakukan hal-hal positif. "Seperti aktif di kegiatan olahraga, seni, serta kegiatan kreatif dan inovatif lainnya, sehingga tidak terpikir untuk melakukan hal-hal negatif,"

ucapnya.

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) kali ini, menurut dia, bukan semata seremonial rutin tahunan, tapi momentum bagi semua pihak untuk menguatkan kembali tekad bersama memerangi Narkoba.

"Sebab akibat Narkoba, bukan hanya diri sendiri yang merasakan, tapi orang lain ikut dampaknya. Keluarga, masyarakat bahkan bangsa hingga generasi ini hancur dan rusak sebab Narkoba," pesan Hadi Mulyadi.

(yans / sdn / humasprovkaltim / adv / aya / sk)

Setelah Dikunjungi KPK, Mursidi Jelaskan Sejarah Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim

SAMARINDA, Swara Kaltim

Adanya anggota Tim Huru Hara atau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di luar dugaan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (30/6/2021) Kemarin.

Kedatangan sejumlah pejabat negara tersebut pun diterima beberapa pengurus

partai tersebut yang kebetulan ada di tempat. Dengan tujuan kedatangan mempertanyakan dan identifikasi aset Pemkot Samarinda dalam hal ini ditempati Partai Golkar Kaltim. Karena waktu bersamaan Ketua Umum DPD Partai Golkar Kaltim Rudi Mas'ud serta Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahrudin sedang tak di tempat.

Selanjutnya, Wakil Sekjen

DPD Partai Golkar Kaltim Mursidi Muslim menjelaskan, ketika pertemuan terjadi, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan ke pengurus terkait sertifikat tanah Pemkot dan sudah menjadi temuan dari BPK RI sejak tahun 2013.

Setelah Andi Harun menjelaskan hal tersebut, kemudian Wali Kota Samarinda menyerahkan kembali ke pihak KPK usai membuka pembicaraan dalam pertemuan.

"Saya pun menceritakan kronologis tentang asal-usul tanah ini. Awalnya tanah ini hasil dari rampasan perang dengan kata lain hal perebutan dan juga eks milik Cina pada waktu itu," tutur Mursidi Muslim.

Selanjutnya, pasca 1965 orang Cina di usir dari Indonesia ini, karena pada era Sukarno itu anti Peking.

Kemudian, lahan ini kosong dan diambil alih oleh TNI Kodim dengan Kodam dan di sita. Di era tersebut, Ketua Golkar bertugas sebagai TNI dan seiring waktu, kader Golkar dulu memperbaiki hingga sekarang. "Atas kejadian kemarin dan di media massa mengemuka, senior di Partai Golkar Kaltim menelpon saya dan beliau bilang jika ingin tertibkan gedung ini, tertibkan gedung yang lain juga," tegasnya.

Karena tanah eks Cina itu ada di Hotel Mercure Plaza 21, Bangunan di samping Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim.

Walaupun sudah menempati selama lebih 30 tahun, lanjut Mursidi Muslim, bahwa Golkar Kaltim tetap menyadari ini milik Pemkot.

"Itu penjelasan kami ke tim yang berkunjung ke Kantor Sekretariat kemarin," jelasnya.

Disinggung terkait pihak tim KPK tidak bisa keluar saat demo, Mursidi Muslim membantah, rombongan KPK datang pukul 10.00 wita dan keluar jam 11.10 wita, sedangkan kedatangan aksi dari Berau pada pukul 12.00 wita.

"Itu tidak benar. Setelah pulang rombongan Wali Kota Samarinda serta Tim KPK, barulah datang pihak APAMB untuk menggelar aksi demo di depan kantor kami," tegasnya.

Mursidi menegaskan, aset Pemkot hanya lahan tanah bukan bangunan dan para kader senior akan bersuara, jika belum ada titik solusi.

"Yang jelas kita tidak pernah akui lahan tanah ini milik Partai Golkar Kaltim dan ini memang milik Pemkot," tegasnya.

(adv / ai / aya / sk)



Retribusi Sampah Non PDAM Rp 7.500 Target tiap bulan Rp 57 juta dari 7.716 rumah

SAMARINDA, Swara Kaltim

Terhitung 1 Juli 2021, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda mulai melakukan penarikan retribusi sampah dan kebersihan non pelanggan PDAM.

Retribusi telah ditetapkan Rp 7.500 tiap rumah.

"Retribusinya Rp 7.500 dengan sasaran sesuai hasil pendataan sebanyak 7.716 rumah yang wajib retribusi ini," ucap Kepala DLH Samarinda Nurrahmani dalam kesempatan peresmian pelepasan petugas penarik retribusi di halaman kantor DLH Samarinda, Kamis (1/7/2021).

Yama—demikian Nurrahmani disapa mengatakan apabila ada masyarakat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi ini maksimal 50 persen.

Yama menyampaikan petugas penarik retribusi ini merupakan kalangan masyarakat akan melakukan penarikan retribusi sampah bagi 7.716 rumah yang tersebar di masing-masing kecamatan

tersebut.

"Setelah kita lakukan pendataan, ada 7.716 yang wajib retribusi non PDAM, dan kita merekrut petugas dari masyarakat yang akan menarik retribusi ke masing-masing rumah," ungkap Yama.

Menurut mantan Camat Sungai Kunjang ini, masing-masing petugas nantinya akan mengunjungi 700 rumah setiap hari setiap bulannya, bagi non pelanggan PDAM.

Nurrahmani juga menjelaskan lebih lanjut bahwa petugas yang akan menarik retribusi sampah non PDAM di lapangan berasal dari rekrutmen yang telah dilakukan DLH dan telah melalui tes.

Melalui petugas yang diterjunkan ke lapangan ini, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda menargetkan pendapatan Rp 57 juta per bulannya dari retribusi sampah Non PDAM. (dho)

Pelataran Sekolah

Pandemi Covid-19, Pelayanan Perpustakaan Dibatasi

SAMARINDA, Swara Kaltim

Masih terjadinya penularan Covid-19 di Kaltim dan khususnya di Samarinda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim, berada di Jalan Ir. H. Juanda No.4, Air Hitam, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk sementara membatasi jumlah pengunjung.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kaltim H Elto, menjelaskan masih terjadinya penularan Virus Corona (Covid-19) di Kaltim saat ini, berdampak pada pembatasan aktivitas pelayanan publik secara fisik.

"Jadi pera pengunjung sebelumnya mendaftar lewat online, setelah itu mereka diberikan jadwal kunjungan, hal ini sebagai upaya supaya tidak terjadi penumpukan pengunjung, jadi datangnya tidak bersamaan, tetapi sesuai jadwal kita berikan yang tentunya para pengunjung tetap melaksanakan protokol kesehatan, khususnya penerapan 3M," kata Elto dikutip *Swara Kaltim* melalui



berita Biro Humas Setprov Kaltim.

Elto juga mengharapkan, selain datang langsung ke Perpustakaan, masyarakat juga membaca buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim melalui layanan perpustakaan online menggunakan aplikasi iKaltim.

"Namun demikian ada juga masyarakat yang sudah terbiasa untuk meminjam buku, terutama para mahasiswa yang sudah menyusun skripsi maupun membuat

tugas makalah, tentu mereka memerlukan beberapa judul literatur, hal seperti tetap kita layani," tandasnya.

Untuk membuka pelayanan seperti biasa, Elto menjelaskan, tentu melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang masih terjadi, apabila semakin meningkat kasusnya, tentu tidak bisa, akan tetapi kalau kasusnya terus menurun kemungkinan pelayanan akan dibuka seperti biasa.

"Untuk membuka pelayanan kepada masyarakat,

tentu kita harus minta izin terlebih dahulu kepada Satgas Covid-19 Kota Samarinda, oleh karena itu kita harapkan penularan Covid-19 di Kal-

tim dan khususnya Samarinda dapat terus menurun, sehingga kita dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Elto. **(aya / sk)**

Nadiem jadi Menteri, karena Masih Ada 'Penjajahan' Dalam Negeri

JAKARTA, Swara Kaltim

Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengungkap alasannya menerima posisi menteri. Nadiem menilai masih ada bentuk penjajahan di dalam negeri.

"Kenapa saya menerima tugas ini sebagai menteri pendidikan, ya karena sekarang walaupun kita tidak dijajah oleh asing kita punya berbagai macam penjajahan di dalam negeri penjajahan mental, diskriminasi sosio ekonomi, intoleransi, hal-hal itu yang menurut saya harus kita mitigasi dan harus kita serang mulai dari generasi muda," kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan *YouTube Megawati Institute*, Selasa (29/6/2021).

Nadiem menilai cara tercepat melawan penjajahan adalah mengubah karakter generasi. Hal inilah yang menjadi alasan pihaknya

mencanangkan program Merdeka Belajar. "Karena cara tercepat yang paling permanen adalah mengubah karakter daripada generasi sebelumnya. Jadi ini adalah kunci, inilah mengapa sebuah platform pendidikan kita itu ber-hulu-hulunya itu dari filsafat Ki Hajar Dewantara dan Bung Karno, yaitu 'merdeka belajar,'" kata Nadiem.

"Itu adalah filsafat pendiri negeri kita, yang menyebut kemerdekaan berpikir, kemerdekaan jajahan mental adalah luar biasa pentingnya, makanya kita menyebut tujuan dari transformasi pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila," ujarnya.

Nadiem mengatakan butir salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah gotong royong. Menurutnya, sikap gotong royong itu dapat diimplementasikan dalam pendidikan. "Bagaimana itu bisa

terjadi kalau gotong royong itu tidak diinstitusikan dinasionalisasikan di setiap jenjang pendidikan, bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu kreatif dan kolaboratif kalau proses pembelajarannya tidak berbasis project base, kalau pembelajarannya tidak berbasis menghasilkan suatu karya," ujarnya.

Nadiem menegaskan program kampus merdeka untuk menghapus sekat universitas dan industri ataupun antar-fakultas. "Itulah mengapa salah satu esensi daripada kebijakan kampus merdeka adalah untuk melepaskan sekat-sekat antara universitas dan industri, melepas sekat antara fakultas ke fakultas lain, melepas sekat antara yang namanya riset atau mengajar atau pengabdian masyarakat. Itu semua kita merdekakan sesuai filsafat Ki Hajar Dewantara dan Bung Karno," ujar Nadiem. **(dnc / sk)**

BNK Test Urine ASN Bumi Batiwakkal

Wabup: Dilakukan secara acak, perdana pegawai Dispora

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau mengadakan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bumi Batiwakkal. Dimana kegiatan tersebut belum diberlakukan untuk seluruh ASN akan tetapi secara bertahap. Meskipun ditengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) BNK harus tetap antisipasi demi memerangi Narkotika di Kota Sanggam ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis, Rabu (30/6). "Jadi untuk tes urine ini kami lakukan secara acak.

Perdana dilakukan pada seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)," ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sasaran BNK tambahannya, bukan hanya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi seluruh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran BNK.

"Wajib semua jalani tes urine tanpa terkecuali. Mengapa harus takut, toh ini untuk kebaikan kita bersama," ujar Gamalis.

Lanjut Wabup, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan memberikan pelajaran sekaligus contoh bagi masyarakat ditengah Covid-19 saat ini harus tetap hati hati pengaruh narkotika. Harapannya agar Kabupaten Berau minim kalau bisa tidak ada lagi kasus Narkotika. Kegiatan



Suasana tes urine di Dispora Kabupaten Berau ditinjau Wabup Gamalis (kanan)

ini akan dilaksanakan selama kurang lebih seminggu kedepan, dan secara acak ke OPD.

"Kita awali dulu dari Pemerintahan sebagai contoh agar peningkatan kasus narkoba ini semakin minim. Jika memang ada terdeteksi atau tersenggol narkoba maka akan kita lakukan tindakan tegas," imbuh ayah dari dua orang putra dan dua orang putri tersebut.

Beliau juga menegaskan apabila ada oknum atau pegawai yang terbukti mengkonsumsi narkoba, BNK juga Pemkab tidak segan segan untuk memberikan sanksi

berupa pemecatan. "Saya berharap kasus narkoba di Bumi Batiwakkal dengan genar dilakukan sosialisasi oleh BNK, lalu lakukan tes urine, mampu turunkan dan semakin

melandai nya kasus narkoba di Berau. Apalagi daerah kita ini juga sebagai lintasan peredaran narkoba, karena itu kita adakan kegiatan ini. Pada Dispora untuk peserta

yang mengikuti pelaksanaan tes urine berjumlah 75 orang terdiri dari Pegawai Tidak tetap (PTT) dan PNS," tutup orang nomor dua di Kabupaten Berau tersebut. (nht)

DATA UPDATE PASIEN COVID-19 RAWAT INAP			
PER 01 JULI 2021			
NO	TEMPAT LAYANAN	JUMLAH PASIEN	KAPASITAS TEMPAT TIDUR
1	PUSKAR BAPELKES	25	40
2	PUSKAR LEMPAKE	5	9
3	PUSKAR SUNGAI SIRING	16	16
4	PUSKAR PALARAN	8	8
5	PUSKAR PPSDM SMD SEBERANG	44	80
6	RS AWS	57	60
7	RS MOEIS	16	50
8	RS HERMINA	21	22
9	RS DIRGAHAYU	39	40
10	RS SMC	31	34
11	RS BAKTI NUGRAHA	0	7
12	RS SIAGA	4	4
13	RS HD	0	2
14	RS ATMA HUSADA MAHAKAM	2	38
TOTAL		268	410

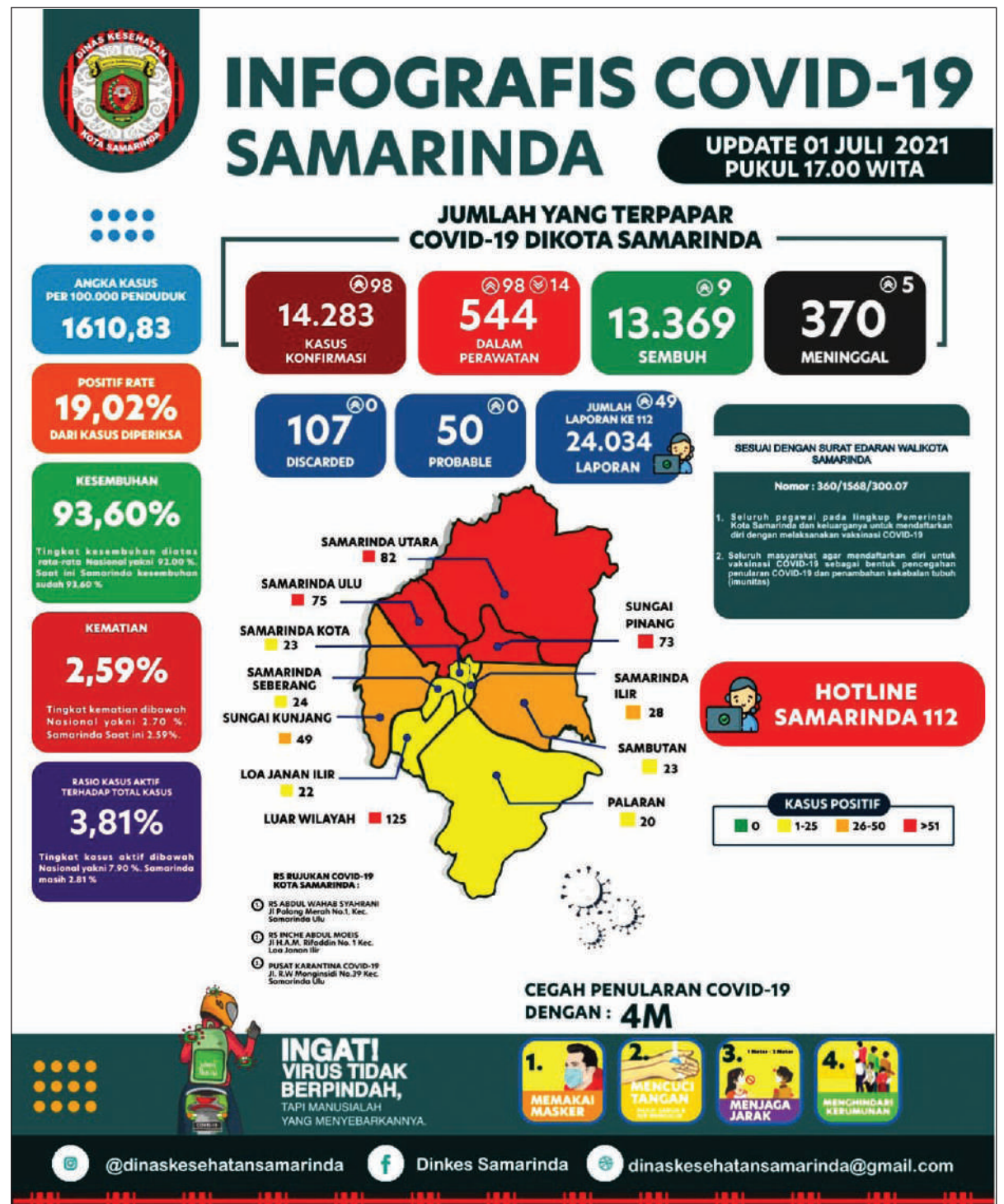
Rasio Kapasitas Tempat Tidur (BOR) 65,37 %
Nb: Standar WHO untuk Bed Occupation rate (BOR) maks. 60%

INGATI! VIRUS TIDAK BERPINDAH, TAPI MANUSIALAH YANG MENYEBARKANNYA.

CEGAH PENULARAN COVID-19 DENGAN: 4M

1. MEMAKAI MASKER
2. MENUCI TANGAN
3. MENJAGA JARAK
4. MENJAGA KESEHATAN

@dinaskesehatansamarinda | Dinkes Samarinda | dinaskesehatansamarinda@gmail.com



Perda RZWP3K, Kepastian Hukum Bagi Investor di Sektor Perikanan dan Wisata Bahari

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Setelah sekian lama dinanti akhirnya payung hukum mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) terbit juga. Jawaban penantian itu dengan terbitnya Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2021, yang disosialisasikan Dinas Perikanan Kabupaten Berau bertempat di Hotel Grand Parama, Kamis (1/7/2021).

Perda RZWP3K ini kepastian hukum bagi investor disektor perikanan dan wisata bahari

Menurut Bupati Bumi Batiwakkal Sri Juniarsih Mas yang membuka kegiatan sosialisasi Perda nomor 2/2021 tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah lama menantikan terbitnya Perda ini.

Kenapa? Sebab melalui Perda ini mampu memberikan kepastian hukum bagi investor di sektor perikanan dan wisata bahari khususnya di Kabupaten Berau ini, umumnya seluruh daerah yang ada di Kaltim. "Daerah kita ini potensi kelautan dan wisata bahari nya sangat besar dan luar biasa, sehingga diperlukan payung hukum untuk mengatur dan mengelola termasuk pulau-pulau kecil yang kita miliki," kata orang nomor satu di Bumi Batiwakkal, Berau tersebut.

Lanjut Bupati Sri Juniarsih, Perda ini juga menjadi angin segar bagi Pemerintah daerah (Pemda) sehingga diharapkan pengelolaan potensi disektor perikanan dan wisata bahari bisa berjalan semakin maksimal.

Ditambah lagi kedepannya Pemkab memang berupaya memacu diri guna memaksimalkan sektor pariwisata terlebih wisata bahari. Mengapa, karena digadang nantinya sebagai pengganti sektor pertambangan.

"Jadi dengan adanya Perda ini maka pulau kecil yang merupakan bagian Sumber Daya Alam (SDA) kita dapat terus terjaga kelestariannya. Disisi lain juga bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu kami berharap sosialisasi ini terus digencarkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai zonasi di Kaltim," tutur Srikandi pertama berhasil menjadi Bupati di Kabupaten Berau ini. (nht)



Foto bersama usai kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas (tengah).



Saat Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsih Mas menerima cenderamata dari Dinas Perikanan.

ULD Ketenagakerjaan Sejalan Misi Gubernur

SAMARINDA, Swara Kaltim

Adanya program Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dinilai sejalan dengan Misi Gubernur Kaltim, yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

"Pemprov Kaltim sangat mendukung program tersebut. Bahkan, sejalan dengan misi gubernur.

Sehingga tidak masalah

diterapkan di Benua Etam," sebut Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor ketika pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan oleh Kemenaker RI, di Hotel Seylyca Mulia Samarinda, Kamis (1/7/2021).

Bagi Kurniawan, program ini akan segera diimplementasikan oleh OPD terkait, yakni Disnakertrans Kaltim.

Karena, akan mendukung peningkatan kualitas dan pendataan SDM Disabilitas di Benua Etam.

"Segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Prinsipnya Pemprov dukung," jelasnya.

Kadisnakertrans Kaltim H Suroto mengungkapkan, segera menindaklanjuti program tersebut dan membentuk ULD ini.

"Kita akan segera buat draf rancangannya. Kemudian disampaikan ke Gubernur. Target kami tahun ini bisa terbentuk.

Aturannya bisa berbentuk keputusan atau pergub, sehingga mereka penyandang disabilitas bisa lebih terarah pengelolaannya," jelas Suroto.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah menyambut baik program ULD tersebut. Diharapkan dapat terbentuk di Benua Etam Kaltim.

"Ini sebagai kontribusi pemerintah kepada penyandang disabilitas. Kami sangat

apresiasi.

Sesuatu yang luar biasa, sangat istimewa bagi penyandang disabilitas. Sebagai wujud komitmen pemerintah dengan membentuk ULD ketenagakerjaan," jelasnya.

Hadir Wawali Bontang Hj Najirah Adi Darma, secara virtual dan membuka kegiatan Sekjend Kemenaker Anwar Sanusi, Plt Direktur Bina PTKDN Nora Kartika Setyaningrum dan pejabat Eselon III lingkup Disnakertrans Kaltim.

(aya / sk)

Pemprov Kaltim Ajak Warga Siapkan SDM Hadapi Perpindahan Ibu Kota

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perindugan Anak (DKP3A) mengajak warga dan semua pihak terkait mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sejak dini untuk menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke daerah itu.

"Persaingan segala bidang pasti lebih ketat jika IKN baru sudah pindah ke Kaltim, maka harus disiapkan sejak kini," ujar Kepala DKP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita di Penajam, Rabu.

SDM yang ia minta disiapkan tersebut terutama bagi warga Penajam Paser Utara (PPU), karena titik nol calon IKN baru berada di kabupaten ini, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Ia juga mengatakan bahwa selain SDM, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah soal kesehatan dan kecerdasan anak yang akan dilahirkan, yakni agar anak tidak menjadi stunting. Untuk itu, ia mengingatkan orang tua dan remaja perempuan selalu menjaga kesehatan, mencukupi asupan gizi yang antara lain dengan sering makan buah dan sayur.

Tujuannya adalah agar bisa melahirkan anak yang tumbuh cerdas dan tidak stunting. Ia

mengingatkan hal ini karena angka stunting di Kaltim tergolong tinggi, yakni mencapai 26 persen.

"Angka stunting di Kaltim saat ini masih sebesar 26 persen, sementara program di Kementerian Kesehatan diharapkan angka stunting di Kaltim bisa turun sampai 14 persen di tahun 2024," kata Noryani.

Ia melanjutkan, melalui

strategi nasional penanggulangan stunting 2018-2024, pemerintah mengupayakan konvergensi dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk pencegahan dan penurunan stunting. Caranya adalah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui Instruksi Gubernur Kaltim Nomor

5/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "Angka kelahiran diprediksi mengalami lonjakan di masa pandemi tahun ini, sehingga perlu perhatian bagi bayi yang akan lahir agar menjadi penduduk berusia produktif pada 2045," katanya.

Saat giat Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal dalam Pencegahan Stunting, di Balai Penyuluhan KB Kabupaten PPU. (ant)

grand elty singgasana

meeting package

benefit:

- 2 times coffee break
- 1 times buffet or dinner lunch
- free meeting room
- standard meeting equipment
- minimum 50 persons

starting from: idr 180.000,-net/pax

hotel grand elty singgasana
Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong
Kutai Kartanegara, East Kalimantan
P. 0541 664705 | F. 0541 664709
email: sales1.gesidelyhotels.com
www.grandeltyhotel.com

sms RESERVATION: 0811 58 2324

Bakrieland
Create - Design - Deliver

Grand Kartika
My Home in Samarinda

Staycation
Promo

Deluxe Room
Rp350.000
nett/night

Sudah Termasuk:

- * Sarapan Pagi Prasmanan Untuk 2 Orang
- * Diskon 10% Room Service
- * Diskon 15% Restaurant
- * Diskon 20% Laundry
- * Diskon 20% Kartika Spa

BOOK NOW
0811 581 3669
(0541) 411 3669

Dapatkan Voucher
Potongan Harga Hingga
Rp100.000

Sepakat 5 Unit Kerja GWPP Diperhatikan Pendanaannya oleh Pusat

SAMARINDA, Swara Kaltim

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah atau Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan maupun peningkatan kualitas SDM. Terutama terkait dari lima unit kerja bidang yang membantu GWPP, mulai Bidang Pemerintahan, Hukum dan Organisasi, Keuangan, Perencanaan dan

Bidang Pengawasan.

"Hal ini wajib diperhatikan. Pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota sepakat lima unit GWPP wajib diperhatikan khususnya pendanaannya," sebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr HM Jauhar Efendi ketika mewakili Sekprov Kaltim HM Sa'bani membuka dan menjadi narasumber, Rakor Perangkat Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah 2021, dengan tema penguatan pelaksanaan dan tugas wewenang GWPP yang digelar Biro PPOD Setprov Kaltim, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (1/7/2021).

Perhatian serius ini sangat diperlukan. Mengingat, perangkat gubernur juga memiliki peran penting membantu Gubernur dalam berbagai hal, khususnya di masing-masing unit yang telah ditetapkan.

Apalagi, lanjut Jauhar, saat ini kondisi pandemi masih terjadi, tentu dukungan pendanaan itu wajib diperhatikan oleh pusat.

Sehingga pelaksanaan program kerja dari pusat di daerah juga dapat terlaksana dengan baik.

"Jadi, pemerintah daerah dan perangkat yang ada sepakat pusat dapat memperhatikan pendanaan maupun peningkatan kualitas SDM

atau pengembangan SDM di masing-masing perangkat gubernur," jelasnya.

Pada kesempatan itu hadir sebagai narasumber Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unmul Dr Iman Surya dan JF AK Ahli Madya Pemprov Kaltim Hj Ardiningsih sebagai moderator serta Kepala Biro PPOD Setprov Kaltim Deni Sutrisno.

(aya / sk)



Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2021 di Swissbell Hotel Samarinda.

Intensifkan Luas Tambah Tanam Padi dan Jagung

SAMARINDA, Swara Kaltim

Pencapaian program luas tambah tanam (LTT) untuk padi dan jagung periode April-September 2021 masih belum mendekati target.

"Kegiatan tanam masih proses di lapangan," kata Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana pada Rapat Koordinasi Evalu-

asi Capaian Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2021 di Swissbell Hotel Samarinda, dikutip *Swara Kaltim* melalui berita Biro Humas Setprov Kaltim, Selasa 29 Juni 2021.

Rakor selama dua hari (29-30 Juni), dihadiri pejabat/wakil kepala BBPOPT Jatisari, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Kepala

UPTD Proteksi, Kepala Bidang/Kepala Seksi Pertanian Kabupaten/kota se Kaltim, disebutkan target serapan Kementan untuk masing-masing eselon 1, yakni sebesar 40 persen sampai akhir Juni ini.

Karenanya, Yana berharap monitoring di tingkat lapangan terkait inputan data-data dalam aplikasi lebih dioptimalkan.

Selain itu, media whatsapp group terkait informasi LTT dan lainnya, per 2 kali seminggu direspon dengan baik sebagai bagian evaluasi.

"Penentuan target tanam bulanan harus mencermati realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya," pinta Yana.

Diakuinya, serapan keg-

iatan Ditjen Tanaman Pangan untuk Kaltim, baik dekon dan tugas pembantuan, kontraknya sudah lebih dari 40 persen.

"Melalui Rakor dirangkai diskusi yang aktif, maka diketahui kendala yang dihadapi kabupaten dan kota, sekaligus dicarikan solusinya, agar LTT lebih maksimal dan sesuai target," harap Siti Farisyah Yana.

(aya / sk)



H. La Ode Nasir saat di tempat penjualan sapi Qurban di Balikpapan, Kamis (1/7/2021).

H. La Ode Nasir Qurban 20 Ekor Sapi untuk PKS, Sekolah PAUD, Rumah Tahfidz Qur'an

BALIKPAPAN, Swara Kaltim

Setiap makhluk diciptakan berjalan menurut apa yang telah ditakdirkan baginya. *Alhamdulillah* H.La Ode Nasir pengusaha sederhana di Hari Raya Idul Adha Tahun 2021 dapat berbagi dengan berkurban 20 Ekor Sapi. "Apa yang kami sekeluarga berikan ini semuanya karena Allah SWT. Dialah yang telah menciptakan kami, sebagai makhluk kami tunduk dan taat akan perintah dan larangan Nya sesuai ajaran yang kami anut yaitu Agama Islam," ujar H.Nasir didampingi Hj. Iim Rahman La Ode Nasir saat bertemu di salah satu tempat penjualan sapi Qurban di Balikpapan, Kamis (1/7/2021).

Kemudian H.Nasir yang didampingi H.Ibnu Suroso pengusaha muda mitra usahanya mengatakan 20 ekor sapi qurban ini akan disampaikan kepada lembaga penyelenggara Qurban yang layak dan bisa mendistribusikan daging-



daging qurban ini betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan lembaga yang diamanahkan H. Nasir seperti sekolah PAUD Qurrota Ayyun, rumah Tahfidz Qur'an jalan Senayan, Kelura-

han Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah dan DPD dan DPC PKS se Balikpapan. "Mohon doanya semoga ikhtiar kita semua Allah SWT mudahkan. Dan di hari raya Idul Adha tahun ini kita semua

senantiasa diberikan Rahman dan nikmat dari-Nya (Allah)," ujar H.Nasir yang baru tiba dari Turki langsung membeli hewan Qurban.

Sementara Kementerian Agama (Kemenag) telah

mengeluarkan edaran mengenai penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1442 H/2021 M ditengah pandemi Corona. Aturan itu terdapat di Surat Edaran Menag No.15 Tahun 2021. **(sis)**



Olahraga



KONI Kaltim Tunda Puslatda karena Tingginya Kasus Covid-19



KONI Provinsi Kalimantan Timur menunda pelaksanaan TC Sentralisasi Mandiri KONI Kaltim atau Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) atlet-atlet yang akan dipersiapkan berlaga di PON XX/2020 Papua, karena tingginya kasus COVID-19 di wilayah setempat.

Komandan Puslatda KONI Kaltim Rusdiansyah Aras menjelaskan sedianya persiapan atlet Kaltim menuju PON tersebut mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2021 dan kemudian ditunda sepekan yakni pada 8 Juli 2021.

"Keputusan penundaan diambil setelah Ketua Umum KONI Kaltim dan beberapa pengurus berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Samarinda yang juga Ketua Satgas Covid-19 di Kota Samarinda dan sesuai arahan Puslatda harus diundur selama sepekan karena pandemi saat ini sedang tinggi-tingginya," kata Rusdi, sapaan akrab Rusdiansyah Aras kepada awak media di Samarinda.

Rusdi mengatakan sisi positif penundaan agenda tersebut adalah KONI lebih punya waktu untuk mempersiapkan pemusatan latihan atlet di masa pandemi dengan sebaik mungkin.

Ia menekankan syarat atlet

masuk Puslatda adalah, mereka harus melakukan swab test terlebih dahulu.

"Penerapan protokol kesehatan ketat akan kami laksanakan selama Puslatda. Tahap awal kami lakukan swab test terlebih dahulu. Kami pun meminta kepada pihak hotel tempat puslatda yakni Hotel Mesra Samarinda untuk memisahkan antara atlet Kaltim dan tamu biasa yang akan menginap di sana," terang Rusdi.

KONI Kaltim sendiri akan menempatkan sekitar 300 atlet di Hotel Mesra. Namun ada beberapa atlet lain akan diberikan tempat terpisah.

Saat ini KONI Kaltim sedang melakukan pemetaan untuk penempatan atlet. Tujuannya agar tak banyak atlet berada di satu tempat.

"Pak Wali Kota Andi Harun juga berpesan kepada kami untuk disampaikan kepada atlet dan pelatih, agar tak berpergian ke Balikpapan terlebih dahulu. Sebab Balikpapan saat ini jadi episentrum penyebaran COVID-19 di Kaltim," terang Rusdi.

Sementara itu, Sekretaris Puslatda KONI Kaltim, Achmad Albert menambahkan, selama Puslatda berjalan atlet akan terus diawasi selama 24 jam oleh tim kesehatan dan

keamanan.

"Atlet juga tak boleh menerima tamu selama Puslatda. Dan atlet hanya boleh keluar dari Puslatda saat latihan saja. Selebihnya mereka tak boleh keluar jika tak ada keperluan mendesak," terangnya.

Prokes ketat memang wajib dilakukan seluruh atlet dan pelatih. Salah satu buktinya adalah, atlet yang pulang latihan harus menjalani pemeriksaan genose sebelum masuk ke kamar.

Menurut Albert, apa yang dilakukan kepada atlet dan pelatih tersebut, semata-mata untuk melindungi mereka dari wabah virus saat ini. "Nantinya sepekan sekali kamar atlet dan pelatih akan rutin disemprot disinfektan," tambahnya.

Meski pelaksanaan Puslatda dilaksanakan di Hotel Mesra, Albert menegaskan kantor pusat Puslatda tetap ada di KONI Kaltim.

Nantinya di hotel hanya ada beberapa pengurus yang diberi tanggung jawab selama Puslatda berlangsung. Soal pencahangan Puslatda, Albert menegaskan akan dilaksanakan di halaman KONI Kaltim. Sebanyak 36 cabang olahraga yang lolos PON, nantinya hanya diwakili 3-4 perwakilan atlet. (*)

CattleyaSpa

promotion

price starting:
idr.250.000
60 minutes

get attractive discount

open:
10 am - 12 pm
ext: 1 / 0

...relaxing, rejuvenating
your body

only at :

Elty Smart Lesong Batu

sms reservation: 0811 58 2324

hospitality with heart



SOCCER MANIA



MU dan Dortmund Dikabarkan Sepakati Transfer Jadon Sancho

Kontrak Lionel Messi di Barcelona berakhir, kini tanpa klub



MANCHESTER UNITED dan Borussia Dortmund dikabarkan telah menyepakati transfer Jadon Sancho. Nilai transfer winger tim nasional Inggris itu 73 juta paun.

BBC melaporkan bahwa kesepakatan dasar telah tercapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund. Biaya transfer senilai 73 juta paun itu, atau sekitar Rp 1,46 triliun, akan dibayarkan MU secara mencicil selama lima tahun.

Dengan nilai transfer ini, Sancho akan menjadi pemain Inggris termahal kedua di

dunia setelah Harry Maguire. Maguire dibeli Manchester United dari Leicester City seharga 80 juta paun pada 2019 silam.

Jadon Sancho masih harus menjalani tes medis dan menyepakati kontrak dengan Manchester United.

Ia diperkirakan akan meneken kontrak berdurasi lima tahun, dengan opsi perpanjangan untuk satu tahun ekstra.

Sejak musim lalu namanya memang sudah terus dikaitkan dengan MU, yang

ingin memperkuat sektor sayap kanan. 'Setan Merah' mengidentifikasi tiga posisi untuk diperkuat, dengan bek dan gelandang tengah jadi dua area lain yang jadi fokus mereka.

Jadon Sancho gabung Borussia Dortmund pada musim panas 2017 dari akademi Manchester City, dengan biaya sekitar 8 juta paun. Pemain 21 tahun itu melejit dan mencetak 50 gol plus 64 assist dalam 137 penampilan dalam empat musim bersama tim senior Dortmund.

LIONEL MESSI

Sementara itu, secara resmi bukan pemain Barcelona lagi. Kontraknya bersama Blaugrana telah berakhir per 1 Juli 2021 ini.

Kontrak Messi bersama Barcelona seperti diketahui hanya berlaku hingga 30 Juni 2021 lalu.

Hingga Eropa mengalami pergantian hari ke 1 Juli, yang terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, Barcelona belum berhasil memperbarui kontraknya.

Maka kini Messi praktis berstatus tanpa klub alias free agent, setelah menghabiskan 7.504 hari sejak ia pertama kali meneken kontrak di atas serbet untuk Barcelona.

Meski demikian, ada optimisme besar di Camp Nou bahwa Lionel Messi tetap

akan bertahan.

Presiden Barca Joan Laporta sebelumnya telah meminta publik di lingkungan klub, khususnya suporter, untuk tetap tenang.

Apalagi hubungannya dengan ayah Messi juga amat baik. Diyakini, Barcelona dan Messi sedang menuntaskan detail-detail kontrak baru dan akan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan.

Messi sempat dikaitkan dengan klub-klub lain seperti Paris Saint-Germain dan Manchester City, dua klub yang diperkirakan mampu membayar gaji besarnya.

Tapi Lionel Messi masih menaruh kepercayaan besar ke Barcelona yang dipimpin Laporta untuk mempertahankannya. (dts)

Penampilan Luke Shaw di Euro Menginspirasi

LUKE SHAW menunjukkan performa yang prima bersama Timnas Inggris di Euro 2020. Pemain berusia 25 tahun itu dinilai bisa menginspirasi.

Inggris mencapai babak perempatfinal Euro 2020. Saat menjalani pertandingan 16 besar, tim Tiga Singa menang atas Jerman dengan skor akhir 2-0.

Dalam pertandingan di Wembley, London, Selasa (29/6) malam WIB, Raheem Sterling dan Harry Kane yang menjadi penentu kemenangan Inggris. Ini merupakan kemenangan terbesar di Euro 2020 sejauh ini.

Luke Shaw menjadi penyumbang assist pada gol Sterling pada menit ke-75.

Shaw juga berperan pada gol Kane. Dia yang memberi umpan pada Jack Grealish sebelum memanjakan Kane dengan crossing yang terukur.

Shaw mendapat kesempatan bermain sebanyak 3 kali dari Gareth Southgate di Euro 2020. Dia membukukan sebanyak 1 assist untuk Inggris.

Dalam catatan UEFA, Shaw membukukan sebanyak 11 crossing dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ada 3 umpan silang yang berhasil dari Luke Shaw.

Eks pemain Timnas Inggris, Micah Richards, bilang bahwa dirinya selalu menyukai permainan Shaw. Pemain Manchester United itu disebut menginspirasi.

"Saya selalu menyukai Luke Shaw. Selalu terbiasa melakukan serangan. Saya selalu memberikan sedikit kritik pada pengiriman bola terakhirnya karena jumlahnya di Southampton tak luar biasa. Saat dia pindah ke Man United, saya pikir itu cocok," kata Richards di BBC.

"Kita mengharapkan melihat Luke Shaw tampil seperti ini lebih cepat, kita membahas mengenai cedera dan itu cedera yang mengerikan. Untuk bisa bangkit dari sisi mental bertanding tak banyak dibahas. Bisa mengatasi hal itu dan bermain yang dia lakukan di hari ini sungguh menginspirasi," kata dia menambahkan. (dts)

Sunset Tea

Enjoy every sunset with best view Mahakam river, while enjoying high quality afternoon snack and tea

All You Can Eat

IDR 55,000
Nett/Person

Monday - Friday,
4 pm - 8 pm

Call us!
0541 737363

Whatsapp
0811 5596 889

Follow us
@zoomhotelmulawarman_official

Alamat: Jl. Mulawarman No. 38 Pelabuhan Samarinda kota Kalimantan Timur 75242

inspired by: **CYRAS**

NASIONAL

Kemenkes Instruksikan Pemda Percepat Vaksinasi Usia Anak hingga Lansia

JAKARTA, Swara Kaltim

Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi yang menasar berbagai kelompok umur.

"Pemerintah saat ini masih fokus pada percepatan vaksinasi yang menasar kelompok usia 12 hingga 17 tahun, mulai 18 tahun ke atas hingga lansia," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Instruksi tersebut, kata Siti Nadia, disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melalui surat edaran bernomor HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan Serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Anak Usia 12-17 Tahun yang ditandatangani Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu pada Rabu (30/6).

Dalam surat tersebut disampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga Selasa (29/6) pukul 18.00 WIB tercatat lebih dari 2 juta orang terkonfirmasi Covid-19, di mana 10,6 persen atau setara lebih dari 200 ribuan merupakan kasus aktif. Surat tersebut juga melaporkan, hampir 260 ribu

kasus terkonfirmasi merupakan anak usia 0-18 tahun, di mana lebih dari 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12-17 tahun.

Tercatat sejumlah lebih dari 600 anak usia 0 hingga 18 tahun meninggal dunia akibat Covid-19, sebanyak 197 anak di antaranya berumur 12-17 tahun dengan angka 'case fatality rate' pada kelompok usia tersebut berkisar 0,18 persen.

Siti Nadia mengatakan vaksinasi merupakan bagian penting dalam rangkaian upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Indonesia telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi SDM kesehatan dan tahap dua bagi kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik," katanya.

Sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, kata Siti Nadia, sejumlah lebih dari 28 juta orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan lebih dari 13 juta orang telah mendapat dua dosis lengkap.

"Pada Juli 2021 dimulai vaksinasi tahap tiga bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat lainnya," katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Siti Nadia, diinstruksikan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota agar menyampaikan program percepatan vaksinasi kepada direktur rumah sakit dan seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi Covid-19.

"Upaya yang dilakukan di antaranya melaksanakan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 tahap tiga bagi seluruh masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya berusia 18 tahun ke atas mulai 1 Juli 2021," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah diinstruksikan memulai pendataan vaksinasi bagi kelompok usia 12 hingga 17 tahun berkoordinasi dengan dinas pendidikan maupun instansi terkait di daerah.

"Kita juga meminta pemda melakukan identifikasi dan percepatan vaksinasi bagi sasaran tahap satu dan dua yang belum mendapatkan dua dosis vaksinasi," kata Siti Nadia. (ant)

Anggota DPR Nilai Reformasi Kepolisian Harus Terus Dilakukan

JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto di Hari Ulang Tahun (HUT) Polri ke 75 reformasi kepolisian masih harus terus dilakukan khususnya reformasi kultural yang masih menjadi "pekerjaan rumah" yang belum terselesaikan secara tuntas.

"Meskipun reformasi Struktural dan Instrumental sudah banyak mengalami kemajuan, Namun, hingga HUT Bhayangkara ke 75 reformasi kultural masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi karena mengubah mindset dan perilaku di lingkungan kepolisian ternyata tidak mudah," kata Didik di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, sejak dilakukannya pemisahan TNI dan Polri, reformasi Kepolisian yang meliputi Reformasi Struktural, Instrumental dan Kultural terus dilakukan dengan harapan mampu membawa perubahan besar di institusi tersebut.

Langkah itu menurut dia dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan

ketertiban, memberikan pengayoman kepada masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Dalam kurun 5 tahun belakangan, saya melihat ada tantangan yang bisa berpotensi membawa kemunduran reformasi Polri jika tidak segera diperbaiki," ujarnya.

Didik menilai ada empat tantangan yang dihadapi Polri, pertama, Polri rawan "terseret" kepada kepentingan politik elit dan politik praktis.

Menurut dia, netralitas polisi dalam kepentingan politik menjadi tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan, karena Polri harus lepas dari kepentingan elit dan politik yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi, kebebasan sipil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

"Perwujudan 'Civilian Police' di Polri perlu komitmen dan konsistensi proses demilitarisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis. Untuk itu memastikan profesionalitas dan independensi di tubuh Polri

menjadi suatu keharusan," katanya.

Tantangan kedua menurut dia, tuntutan akuntabilitas Polri, reformasi kepolisian selama ini masih dianggap ada persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai bagian aparat penegak hukum.

Dia menilai, ada tiga hal yang butuh perhatian khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat.

"Aparat Kepolisian diharapkan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan diskriminatif, dan sebaliknya diharapkan menjadi pengayom masyarakat secara adil," ujarnya.

Dia menjelaskan, tantangan ketiga, praktik "represi" baik di ruang publik masih menjadi momok di masyarakat, karena dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap masih banyak arogansi yang dilakukan Kepolisian terhadap masyarakat sipil.

Bahkan menurut dia, tidak

sedikit yang kemudian berpotensi berujung kepada kriminalisasi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

"Tindakan kekerasan yang berlebihan, arogansi aparat kepolisian ini harus menjadi bagian reformasi yang harus diwujudkan," tutur-nya.

Tantangan keempat menurut dia, perilaku koruptif dan gaya hidup mewah, secara kelembagaan Polri harus mampu membangun zona

integritas dan memastikan segenap anggotanya terhindar dari perilaku korup dan gaya hidup mewah.

Karena itu dia menilai, Kapolri dihadapkan kepada pekerjaan rumah yang cukup fundamental yang masih harus diselesaikan sehingga perwujudan transformasi Polri yang presisi akan optimal dapat diwujudkan jika beberapa hal fundamental tersebut dapat diselesaikan. (ant)



Ekonomi & Bisnis

Pemkot Samarinda Evaluasi Kembali Tarif Retribusi dan Pajak Bagi Pelaku Usaha

SAMARINDA, Swara Kaltim

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mengatur kembali tarif pemungutan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha di Kota Tepian.

Evaluasi tarif tadi berdasarkan arahan dari Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun setelah melakukan peninjauan lapangan dan mengintruksikan agar beberapa tarif pajak dan retribusi selama ini bisa ditinjau kembali.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus, mengatakan jika pihaknya kini tengah mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi di lingkungan Pemkot untuk membahas tarif yang bisa ditinjau kembali.

"Jadi domain perubahan ini sebenarnya ada di OPD pemungut, jadi setelah itu baru kita rancang dalam Peraturan Daerah (Perda) sebelum diusulkan ke eksekutif," ungkapnya ketika memimpin rapat evaluasi tarif retribusi dan pajak, Kamis (1/7/2021) di Balai Kota.

Ia mengatakan, evaluasi tarif tadi sangat penting, karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda yang hingga tengah semester belum mencapai target.



Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus saat memimpin rapat evaluasi tarif retribusi dan pajak, di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).

Dimana hingga 28 Juni 2021 baru menyentuh angka Rp 230 miliar dengan persentase sebesar 30 persen.

"Harusnya di tengah semester sudah mencapai 50 persen.

Walaupun hasil ini ada

kaitanya dengan kondisi pandemi saat ini," ungkapnya.

Belum lagi sambung dia, APBN juga lagi merosot hingga Rp 300 triliun, otomatis juga berpengaruh terhadap dana bagi hasil ke pemerintah daerah, sehingga ujungnya

APBD kota Samarinda juga ikut terkoreksi.

Memang sambung dia, ada beberapa objek pajak yang tidak bisa diganggu lagi terkait tarif pajak karena ikut terdampak pada kondisi pandemi.

"Seperti pajak hiburan di bioskop, dulu sebelum pandemi dalam sebulan bisa menyedot ke pemerintah bisa mencapai Rp 1 miliar, saat ini kasihan nyedot Rp 100 juta aja sudah susah,"aku Barus.

Begitu pun dengan tarif parkir ditepi jalan, ia mengatakan tidak ada evaluasi tarif, melainkan lebih ke maksimalkan pemungutan, terlebih saat ini sudah menggunakan sistem elektronik atau e parking. Sehingga sosialisasi sangat perlu dilakukan.

Mantan kepala Inspektorat ini menginginkan agar usulan dari OPD bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, terutama terkait penyesuaian tarif.

Harapan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda ini agar tercapai optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah tahun 2021 dan 2022.

"Sesuai amanah sebenarnya dalam 3 tahun perubahan tarif ini harus disampaikan, tarifnya bisa naik atau tidak, kalau tidak bisa naik apa alasannya. Untuk hari ini kita membahas lebih ke regulasi aja, semoga dalam waktu 2 minggu ke depan sudah ada jawaban tertulis dari OPD pemungut terkait perubahan tarif ini agar bisa segera disampaikan ke Wali Kota," kata Barus. **(kmf-smd)**

SAMBUNGAN

Pertemuan

Dari Halaman 1

KPK dan Wali Kota Andi Harun, Andi Harun meminta diadakan pertemuan, dan kebetulan ada Mursidi Muslim dan rekan lainnya yang menyambut serta menjelaskan duduk persoalan tentang asal-usul tanah dan bangunan ini. "Pertemuan tersebut dapat kami tarik kesimpulan bahwa kedatangan KPK sebenarnya ada kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ikut menginventarisir aset Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang saat itu kebetulan datang ke Kota Samarinda," tuturnya.

"Bahkan mungkin ada 1300 aset yang jelas peruntukannya dan sebagainya di mata BPK RI, yang menurut KPK itu segera diclearkan," imbuhnya.

Untuk itu Pemkot meminta diajukan sampling, uji petik terhadap 1300 aset tersebut, pihak Golkar mengerti, pihak KPK tidak mengerti dibawa ke

kantor Golkar ketika itu.

"Karena dalam durasi pertemuan tersebut, pihak KPK lebih banyak memberikan arahan dan pencerahan ke pihak Pemkot Samarinda beserta jajarannya, baik itu keberadaan, kegunaan, maupun kepemilikan aset tersebut dan kegiatan ini juga didokumentasikan dalam bentuk video oleh pengurus yang kebetulan hadir saat itu," jelasnya.

Untuk Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim, sambung ayub pihak KPK hanya menyampaikan ulasan sedikit, karena KPK menyatakan belum mempelajari telaahan BPK RI terhadap persoalan Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim dengan Pemkot Samarinda.

"Pihak KPK juga menyatakan bersikap netral yang hanya menginginkan untuk mencari alternatif secara umum

yakni win-win solution, yakni saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa memang, sejak tahun 1970an kantor Golkar sudah ada di Jalan Mulawarman, yang sebelumnya tidak ada kepemilikan tanah dan baru pada 2003, tanah ini sudah bersertifikat milik Pemkot Samarinda. "Kami tetap mengakui tanah ini milik Pemkot Samarinda, sedangkan bangunan kantor ini kami bangun dengan tetesan keringat dan darah kader partai Golkar," terangnya.

Selanjutnya, Ayub berpesan, kerja sama saling menguntungkan pilihan tepat, karena selama ini Partai Golkar juga punya andil dalam membangun Kota Samarinda.

Ketika era Syaharie Jaang telah membuat surat perjanjian sewa-menyewa dengan Golkar

Kaltim pada April 2020.

"Adapun surat tersebut sudah ada sama kami dan kami pun berjanji akan menuntaskan persoalan aset ini, sehingga tidak membebani Pemkot Samarinda pada penyerahan BPK pada tahun berikutnya. Agar ini tidak melanggar aturan hukum yang berlaku maupun perundangan lainnya," ucapnya.

Disinggung langkah selanjutnya, Ayub menjelaskan bahwa yang pertama akan dilakukan yakni dalam dekat ini mencoba mengkomunikasikan ke Pemkot Samarinda untuk membantu Golkar guna menyelesaikan persoalan lahan. "Kami berharap bisa dilakukan dengan kerjasama sewa menyewa dan kami akan mendalami nominalnya nanti, seperti yang telah dilakukan oleh Walikota Samarinda sebelumnya yakni Syaharie

Jaang," harapnya.

Kedua, sambung Ayub bahwa ketika hukum adalah panglima tertinggi kita berharap bahwa sejarah itu dapat berbicara secara detail, sebenarnya secara hukum Golkar menguasai memang segala aset yang disini, namun sertifikat tanah di tahun 2003 itu tidak mengetahui disahkan sertifikat tanah atas Pemkot Samarinda. "Menurut kami perlu ditelaah lebih lanjut, kita akan berproses hukum, atau kemudian ada win win solution yang di tawarkan, dan proses hukum untuk menggugat terkait sertifikat itu paling belakang, yang terpenting adalah win solution-nya," ucapnya

Partai Golkar menyadari bahwa aset Pemkot ini juga merupakan hasil pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan kembali dalam memakmurkan masyarakat Kota Samarinda.

(adv / ai / aya / sk)

DLH Resmi Tarik Retribusi Sampah Non PDAM

Wawali lepas petugas door to door ke 7.716 rumah

SAMARINDA, Swara Kaltim

Akhirnya resmi sudah Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Samarinda melakukan penarikan retribusi persampahan dan kebersihan non pelanggan PDAM per 1 Juli 2021.

Pemberlakuan kebijakan ini ditandai dengan pelepasan secara simbolis petugas penarikan retribusi oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Rusmadi di Halaman Kantor DLH Kota Samarinda, Kamis (1/7/2021) pagi.

Tampak hadir kepala DLH Nurrahmani, kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus dan Sekretaris Diskominfo Samarinda, Dian Ruhendra.

"Kami menyambut baik terobosan yang dilakukan DLH yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda terkait penarikan retribusi persampahan dan pelayanan kebersihan non pelanggan PDAM ini," kata Rusmadi.

Menurutnya apa yang dilakukan ini bukan semata hanya mengejar retribusi. Tetapi un-



Wawali Rusmadi simbolis melepas petugas penarik retribusi.

tuk membuktikan pelayanan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat secara lebih baik.

"Yang tidak bisa dipisahkan dalam terobosan ini adalah retribusi yang akan mening-

katkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, - Red.). Karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan kemajuan Kota Samarinda ini sangat tergantung pada pendapatan pajak dan retribusi," terangnya.

Namun di sisi lain lanjut dia, ada tanggung jawab dan konsekuensi logis yang harus dipikul juga bertambah. Ketika penarikan retribusi diberlakukan, maka harus diiringi dengan pelayanan persampahan

dan kebersihan yang semakin baik.

"Saya memberikan apresiasi kepada DLH Kota Samarinda serta pasukan yang berada di lapangan yang tidak pernah lelah bekerja menata Samarinda menuju kota peradaban," pungkasnya.

Sementara Kepala DLH Kota Samarinda Nurrahmani menyampaikan bahwa setelah melakukan pendataan, terdapat 7.716 wajib retribusi non PDAM. Besaran retribusi yang dipungut adalah Rp7.500 setiap objek per bulan. Diketahui selama ini pembayaran retribusi sampah dari masyarakat kota Samarinda dilakukan melalui pembayaran rekening bulanan air PDAM Tirta Kencana Samarinda.

Maka dari itu, masyarakat yang tidak atau belum berlangganan air PDAM selama ini belum terjangkau oleh sistem pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan setiap hari masyarakat yang tak berlangganan PDAM juga membuang sampah yang diangkut ke TPS dan TPA, yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2019, juga wajib melakukan pembayaran retribusi sampah. (dho)

SUARA JUM'AT

Hidup di Dunia ini Hanya Kesenangan yang Menipu



Oleh: **Arbani**

"**BESAR PASAK DARIPADA TIANG**" adalah sebuah peribahasa lama, nasihat dari leluhur kita. Secara umum artinya suatu keadaan

seseorang dimana lebih besar pengeluaran daripada penghasilan.

Mestinya budaya hidup hemat dan menyesuaikan dengan pendapatan tetap dijalankan sesuai kultur kita sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 sekarang yang memprihatinkan dan membuat hati banyak orang diliputi perasaan was-was.

Di tempat lain banyak orang terlihat ngumpul-ngumpul di cafe, membicarakan hal-hal yang tak jelas, sambil nonton tayangan live pertandingan sepakbola di televisi.

Ada juga seorang sahabat merayakan hari Ulang Tahun anaknya dengan menginap di sebuah hotel berbintang di kota Samarinda ini. Tentunya menikmati fasilitas mewah, seperti kolam renang yang menyejukan, menikmati makanan lezat dan minuman enak yang disediakan hotel.

Dari foto yang ia upload di media

sosial tampak mereka begitu bahagiannya.

Namun dibalik itu semua sesungguhnya siapapun tak ada yang tau apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan atau apa yang terjadi di hari esok, apakah kesenangan yang akan didapat lagi atau justru ujian kesengsaraan hidup.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalalkan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang karenanya tumbuh tanam-tanaman yang membuat kagum para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lantas menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (Al-Qur'an Surat Al-Hadid: 20)

Silahkan bersenang senang menggunakan pendapatan yang kita dapat, karena itu hak setiap orang, tapi janganlah terlampaui bersenang senang melebihi apa yang kita terima.

Wallahu a'lam bishawab. ***

